

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si



PEMERINTAHAN DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH



PEMERINTAHAN DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH

PENULIS

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si

EDITOR

Jeane Mantiri, SAB, MAP



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEMERINTAHAN DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si

EDITOR:

Jeane Mantiri, SAB, MAP

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8522-58-3

UKURAN:

iv + 172 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

April 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Pemerintahan dalam Konsep Otonomi Daerah”**. Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara agar dapat terciptanya pemerintahan yang bersih yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH	1
A. Pengertian Pemerintahan Daerah	1
B. Sejarah Pemerintah Daerah	5
C. Konsep Pemerintah Daerah	8
D. Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah	10
E. Unsur Pemerintahan Daerah.....	16
F. Fungsi dan Tugas Pemerintah Daerah.....	26
G. Dimensi Pemerintahan daerah.....	28
H. Bentuk Pemerintahan Daerah	30
I. Keberadaan Pemerintahan Daerah	33
J. Latihan Soal.....	42
BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	43
A. Asas Dekonsentrasi	43
B. Asas Desentralisasi.....	53
C. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	78
D. Ajaran Rumah Tangga Materiil.....	90
E. Ajaran Rumah Tangga Formil.....	91
F. Ajaran Rumah Tangga Riil.....	93
G. Asas Tugas Pembantuan.....	99
H. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004.....	113
I. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.....	124

J. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	131
K. Latihan Soal	135
BAB III PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI DAERAH.....	136
A. Pembentukan Pemerintahan Daerah	136
B. Pengertian Otonomi Daerah	138
C. Asas Umum Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.....	139
D. Prinsip Otonomi Daerah	140
E. Ciri-Ciri Daerah yang Berotonomi	141
F. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	142
G. Latihan Soal	144
BAB IV PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN.....	145
A. Pengertian Kewenangan	145
B. Konsep Hubungan Kewenangan dan Pembagian Kewenangan	146
C. Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah.....	149
D. Peran dan Fungsi Pemerintah Pusat.....	152
E. Kewenangan Pemerintahan Pusat.....	152
F. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	154
G. Latihan Soal	155
BAB V SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	156
A. Konsep Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	156
B. Hubungan RPJMN dengan RPJMD	157
C. Permasalahan Sinkronisasi RPJMD dan RPJMN...	158
D. Tujuan Pembangunan Nasional	160

E. Latihan Soal.....	161
BAB VI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH .	162
A. Konsep Administrasi Pemerintahan Daerah.....	162
B. Sumber-Sumber Keuangan Daerah	162
C. Perkembangan Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia.....	163
D. Administrasi Pemerintah Daerah pada Masa Penjajahan Belanda	164
E. Administrasi Pemerintah Daerah pada Masa Penjajahan Jepang	165
F. Administrasi Pemerintah Daerah Masa Berlakunya UUD 1945	166
G. Administrasi Pemerintah Daerah dalam Masa Kedua Berlakunya UUD 1945.....	167
H. Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah.....	168
I. Latihan Soal.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171